



Analisis Aspek Lingkungan, Ekonomi, dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Lereng Ambeso Kabupaten Tana Toraja Dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan

La Ode Rohiman¹, Syamsinar², Andi Kasirang T. Baso³, Amal Said⁴, Awaluddin Yunus⁵

^{1,2,4,5}Universitas Islam Makassar, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: rohimanlaode@gmail.com, syamsinar.dpk@uim-makassar.ac.id,
andikabaso@gmail.com, amal.dpk@uim-makassar.ac.id,
awaluddinyunus.dty@uim-makassar.ac.id

Kata Kunci

Aspek ekonomi,
Aspek lingkungan,
Kelembagaan,
Kelompok Tani
Hutan, Perhutanan
Sosial.

Abstrak

Perhutanan Sosial merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan tenurial dengan memberikan akses legalitas pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat yang salah satunya melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). World Resources Indonesia (WRI) menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan Perhutanan Sosial mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Aspek Lingkungan, Ekonomi, dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lereng Ambeso Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan wawancara terhadap seluruh 44 anggota KTH, dilengkapi dengan analisis data deskriptif dan teknik skoring berdasarkan indikator keberhasilan dari World Resources Indonesia (WRI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek lingkungan dan ekonomi KTH Lereng Ambeso berada dalam kategori "Sangat Baik" dengan nilai skor masing-masing 150,00 dan 167,57. Sementara itu, aspek kelembagaan berada dalam kategori "Cukup Baik" dengan skor 105,00. Temuan ini mengimplikasikan bahwa meskipun KTH Lereng Ambeso telah berhasil dalam aspek lingkungan dan ekonomi, masih diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, seperti peningkatan frekuensi pertemuan dan capaian rencana kerja, untuk memastikan keberlanjutan program Perhutanan Sosial secara optimal.

Keywords

Economic aspects,
Environmental
aspects, Forest
Farmer Groups,
Institutional, Social
Forestry.

Abstract

Social Forestry is a form of resolving tenure problems by providing legal access to the management of state forest areas to the community, one of which is through the Community Forest (HKm) scheme. World Resources Indonesia (WRI) sets indicators for the success of implementing Social Forestry covering environmental, economic, and institutional aspects. This research aims to analyze and describe the environmental, economic, and institutional aspects of the Lereng Ambeso Forest Farmers Group (KTH), Tana Toraja Regency in the implementation of the Social Forestry Community Forest scheme. The research method used was a survey and interviews with all 44 KTH members, supplemented by descriptive data analysis and scoring techniques based on success indicators from World Resources Indonesia (WRI). The results show that the environmental and economic aspects of the Lereng Ambeso KTH are in the "Very Good" category with scores of 150.00 and 167.57, respectively. Meanwhile, the institutional aspect was in the "Quite Good" category with a score of 105.00. This finding implies that although the Lereng Ambeso KTH has been successful in the environmental and economic aspects, strengthening of the institutional aspect, such as increasing the

frequency of meetings and achievement of work plans, is still needed to ensure the optimal sustainability of the Social Forestry program.

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo – Jusuf Kalla pada periode 2014-2019, bersama program Reforma Agraria (Fitriana, 2021). Program PS bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dengan memberikan akses legalitas pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat yang telah menghuni dan/atau mengelolanya (Marzuki, 2025). Masyarakat tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan kesejahteraan, dan mereka juga menjalankan fungsi pelestarian hutan secara bersamaan (Herindrasti et al., 2022; Herutomo & Istiyanto, 2021). Pada Tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut mengatur lima skema PS, yakni: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa/Nagari (HD/N), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan (Banjade et al. 2016).

Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan kawasan hutan yang dominan dari luas wilayah kabupaten sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan (Paembonan et al., 2021; Trilia, 2023). Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan s/d Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6626 Tahun 2021), luas kawasan hutan di Kabupaten Tana Toraja mencapai 52% dari luas wilayah kabupaten dengan rincian luas per fungsi yakni Kawasan Hutan Konservasi seluas ± 4.867 Ha, Kawasan Hutan Lindung seluas ± 84.284 Ha, Kawasan Hutan Produksi seluas ± 19.809 Ha. Dengan luas kawasan hutan yang dominan, maka diperlukan program Perhutanan Sosial untuk masyarakat Tana Toraja guna memperoleh legalitas akses dalam melakukan aktivitas dan kegiatan dalam kawasan hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian dan fungsi ekologis kawasan hutan (Bimantara & Samsu, 2025).

Sampai dengan tahun 2021, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diterbitkan 5 (lima) izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) pada 5 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di 5 desa dalam 3 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja yakni KTH Lereng Ambeso, KTH Salu Pana', KTH Tanan Tannin, KTH Salu Malino, dan KTH Salu Malino. Dari 5 kelompok tani hutan di Kabupaten Tana Toraja yang telah memperoleh Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai data hasil monitoring Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang sampai dengan Tahun 2022, hanya terdapat 1 (satu) kelompok tani hutan yang mampu berkembang dan mandiri yaitu KTH Lereng Ambeso.

World Resources Indonesia (WRI) menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan Perhutanan Sosial yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan (Affandi, 2019; Laksemi & Sulistyawati, 2019; Pambudi, 2023). Ketiga kriteria induk ini lalu dikembangkan menjadi indikator-indikator turunan yang lebih rinci. Kriteria lingkungan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) tata kelola lahan, 2) konservasi hutan, dan 3) persepsi

terhadap lingkungan (Purnomo et al., 2018; Siahaya et al., 2024; Surasana et al., 2022). Untuk kriteria sosio-ekonomi dikembangkan dalam lima indikator yang akan dinilai dengan menggunakan data primer dan sekunder (Dikuraisyin, 2020). Adapun kelima indikator tersebut adalah 1) kontribusi pendapatan dari Perhutanan Sosial, 2) distribusi pendapatan, 3) manajemen pendapatan, 4) kesejahteraan subyektif, dan 5) gender (Fitri & Prasmatiwi, 2022; Muliawan TS, 2021). Sedangkan untuk aspek kelembagaan beberapa aspek spesifik, yaitu 1) tata kelola lahan, 2) manajemen organisasi, 3) kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan 4) manajemen konflik (Syarief et al., 2022).

Keberhasilan program Perhutanan Sosial tidak hanya diukur dari aspek legalitas pemberian izin, tetapi juga dari keberlanjutan pengelolaan dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan (Anwarudin, 2024; Pambudi, 2023). Penelitian Wasongko (2024) menunjukkan bahwa implementasi Perhutanan Sosial di berbagai daerah menghadapi tantangan yang beragam. Baynes et al. (2015) melalui kajian komprehensif terhadap community forestry di negara berkembang mengidentifikasi bahwa faktor kunci keberhasilan mencakup kepastian tenurial, kapasitas kelembagaan yang kuat, dan dukungan ekonomi yang memadai. Sementara itu, García (2022) menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mencapai keberlanjutan. Di Indonesia, studi Tifani (2024) mengungkapkan bahwa evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan Perhutanan Sosial, yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi tetapi juga kelestarian lingkungan dan penguatan kelembagaan.

Fenomena keberhasilan KTH Lereng Ambeso di tengah stagnansi empat KTH lainnya di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan adanya faktor-faktor spesifik yang perlu diidentifikasi dan dipahami secara mendalam. Hal ini menjadi penting mengingat pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi pendukung seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kelompok Tani Hutan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, namun implementasinya di lapangan masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi best practices yang dapat direplikasi pada kelompok tani hutan lainnya, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan kelompok tani lain belum mampu berkembang secara optimal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan tiga aspek utama (lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan) secara simultan pada kasus KTH yang telah terbukti berhasil. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengevaluasi aspek-aspek tersebut secara parsial, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi WRI yang telah terstandarisasi untuk memberikan penilaian holistik terhadap keberhasilan implementasi HKm. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris tentang bagaimana kelompok tani hutan di kawasan dengan karakteristik sosial-budaya Toraja yang khas mampu mengintegrasikan kearifan lokal dengan sistem pengelolaan hutan modern untuk mencapai keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis aspek lingkungan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial skema HKm oleh KTH Lereng Ambeso, (2) menganalisis aspek ekonomi dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial skema HKm oleh KTH Lereng Ambeso, dan (3) menganalisis aspek kelembagaan dalam pelaksanaan

Perhutanan Sosial skema HKm oleh KTH Lereng Ambeso. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan literatur tentang implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keberhasilan program Perhutanan Sosial di wilayah lain, khususnya di Kabupaten Tana Toraja dan umumnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Tani Hutan Lereng Ambeso di Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tana Toraja. Alasan pemilihan lokasi penelitian dan objek penelitian karena KTH Lereng Ambeso merupakan salah satu pemegang izin HKm yang mampu eksis diantara 5 izin Hkm lainnya di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program Perhutanan Sosial skema HKm berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh World Resources Indonesia (WRI).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pada 5 Kelompok Tani Hutan pemegang izin Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tana Toraja. Adapun sampel adalah anggota kelompok tani hutan Lereng Ambeso yang dilakukan secara sensus atau menyeluruh sebanyak 44 anggota. Sedangkan untuk informasi tambahan dilakukan pendalaman informasi kepada 1) Unit pengelola kawasan hutan setempat (Dinas Kehutanan); 2) Pemerintah daerah setempat atau perangkat Kecamatan/Desa; 3) Tokoh masyarakat disekitar kawasan hutan.

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan studi literatur dan studi lapangan untuk mengembangkan indikator dan metodologi keberhasilan pelaksanaan PS. Metode pengambilan data primer adalah dengan menggunakan survei anggota kelompok tani dengan menggunakan kuisioner, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Selain itu, analisis spasial juga dilakukan dengan menggunakan data spasial yang sifatnya terbuka untuk umum, seperti data perubahan tutupan pohon dan data kawasan hutan.

Variabel yang diukur pada penelitian ini dalam rangka melakukan penelitian pelaksanaan aspek PS dengan skema Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh KTH Lereng Ambeso adalah:

- a. Aspek Lingkungan;
- b. Aspek Ekonomi;
- c. Aspek Kelembagaan

Tabel 1. Kriteria dan Kategori Nilai Pelaksanaan HKm Lereng Ambeso

NO	KRITERIA	KISARAN NILAI	KATEGORI NILAI				
			Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang	Tidak Baik
1.	Lingkungan (Tata kelola kawasan HKm)	0-175	141-175	106-140	71-105	36-70	0-35
2.	Ekonomi (Tata kelola usaha HKm)	0-200	161-200	121-160	81-120	40-80	0-40
3.	Kelembagaan	0-175	141-175	106-140	71-105	70	0-35

NO	KRITERIA	KISARAN NILAI	KATEGORI NILAI				
			Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang	Tidak Baik
	Kisaran Nilai Total	0-550	443-550	333-440	223-330	138-220	0-115

Sumber: Monev Sudarsono (2016)

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini didasarkan atas pedoman monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) oleh Sudarsono. Teknis analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data yang terkumpul dari kuisisioner, wawancara, dan observasi lapangan ditabulasi dan dikategorikan berdasarkan tiga aspek utama yaitu lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Kedua, dilakukan sistem skoring terhadap setiap indikator dengan memberikan bobot pada masing-masing aspek secara berimbang sesuai jumlah pertanyaan dalam kuesioner dan sub variabel yang telah ditetapkan. Ketiga, skor yang diperoleh dari masing-masing indikator dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total per aspek. Keempat, nilai total tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan kisaran nilai yang telah ditetapkan dalam Tabel 1 untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan HKm dalam kategori Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang, atau Tidak Baik. Kelima, dilakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan makna dari skor yang diperoleh dengan mengaitkan hasil kuantitatif dengan data kualitatif dari wawancara mendalam dan observasi lapangan. Keenam, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (anggota KTH, pengurus, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah) untuk memastikan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kelompok Tani Lereng Ambeso merupakan kelompok tani yang berdomisili di Lingkungan Lali' Kelurahan Benteng Ambeso Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai lokasi tersebut dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat yang berjarak $\pm$ 30 Km dari Ibukota Kabupaten. Areal kerja Hutan Kemasyarakatan merupakan bagian dari sub DAS Saddang dengan luas izin Perhutanan Sosial $\pm$ 200 Ha.

Kelompok tani Lereng Ambeso memperoleh persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1689/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2019 Tanggal 11 Maret 2019. Melalui Keputusan tersebut, 44 anggota Kelompok Tani Lereng Ambeso diberikan akses legal untuk melakukan pengelolaan Kawasan Hutan dengan menggarap lantai hutan untuk ditanami tanaman kopi dan beberapa tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang. Dalam pengelolaannya, masing-masing anggota kelompok memperoleh akses lahan dalam Kawasan Hutan untuk dikelola seluas $\pm$ 0,5 sampai 1 hektar. Dalam lahan tersebut setiap anggota kelompok tetap melestarikan fungsi hutan dan tidak melakukan pembukaan lahan baru.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diperoleh dalam proses penelitian dapat kategorikan berdasarkan kelas usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Informasi ini menjadi penting untuk mendeskripsikan tingkat kualitas jawaban yang diberikan melalui kuisioner.

Berdasarkan Kelas Usia

Tabel 2. Responden per Kelas Usia

Kelas Usia	Jumlah Orang	Persentase
29-38	8	18,18%
39-48	14	31,82%
49-58	19	43,18%
59-68	3	6,82%
Total	44	100,00%

Sumber: Data Lapangan, 2023

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa responden yang dalam hal ini merupakan anggota kelompok tani Lereng Ambeso mayoritas berada pada rentang usia 49 tahun sampai dengan 58 tahun yakni sebanyak 19 orang atau sebesar 43,18% dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penggarap atau anggota kelompok tani Lereng Ambeso berada pada usia produktif yang sangat mendukung dalam menjalankan kegiatan dan kelembagaan kelompok tani.

Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. Responden per Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase
Laki-laki	35	79,55%
Perempuan	9	20,45%
Total	44	100,00%

Sumber: Data Lapangan, 2023

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa responden yang dalam hal ini merupakan anggota kelompok tani Lereng Ambeso mayoritas berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 35 orang atau sebesar 79,55% dari keseluruhan responden. Data ini menunjukkan bahwa dengan mayoritas laki-laki sebagai penggarap akan sangat berkontribusi dalam menunjang pengolahan lahan sehingga produktivitas tetap terjaga. Namun, komposisi perempuan yang relatif tidak kecil juga menunjukkan adanya peran dan pemberdayaan wanita dalam jalannya kegiatan dan perusahaan kelompok tani.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Responden per Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase
SD	4	9,09%
SMP	3	6,81%
SMA / SMK	31	70,45%

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase
Diploma / Sarjana	6	13,63%
Total	44	100,00%

Sumber: Data Lapangan, 2023

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa responden yang dalam hal ini merupakan anggota kelompok tani Lereng Ambeso mayoritas mempunyai jenjang Pendidikan SMA / SMK yakni sebanyak 31 orang atau sebesar 70,45% dari keseluruhan responden. Data ini menunjukkan bahwa penggarap dalam anggota kelompok tani Lereng Ambeso tergolong kategori berpendidikan menengah atas. Komposisi tingkat pendidikan anggota ini sangat menunjang jalannya kegiatan dan pengembangan kelompok tani

Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan menjadi aspek yang sangat penting untuk mengukur pelaksanaan pengelolaan hutan karena tujuan akhir dalam seluruh model pengelolaan hutan adalah terwujudnya kelestarian hutan yang dikelola. Adapun variabel penilaian yang diukur dalam pelaksanaan perhutanan sosial model Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Kelompok Tani Lereng Ambeso mencakup kriteria (1) konflik yang terjadi dalam pengelolaan Hkm; (2) kesadaran dan usaha dalam perlindungan keanekaragaman yang ada di dalam hutan kemasyarakatan; (3) peningkatan ketersediaan dan kualitas air di sekitar wilayah HKm; (4) upaya menjaga kualitas tanah dalam mengolah areal HKm; (5) pemahaman tentang cara pengelolaan hutan kemasyarakatan secara tradisional dan modern dengan menjaga hutan tetap lestari; (6) cara tertentu untuk melestarikan lingkungan; dan (7) peningkatan tutupan hutan dalam areal Hkm. Adapun hasil penilaian terhadap aspek lingkungan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Penilaian Aspek Lingkungan

Indikator	Hasil	Nilai
Adanya konflik yang terjadi dalam pengelolaan Hkm	Tidak pernah terjadi konflik	25
Adanya kesadaran dan usaha dalam perlindungan keanekaragaman yang ada di dalam hutan kemasyarakatan	Adanya usaha perlindungan	20
Adanya peningkatan ketersediaan dan kualitas air di sekitar wilayah HKm	Sedang atau normal	10
Adanya upaya menjaga kualitas tanah dalam mengolah areal HKm	Tidak mengolah dengan pupuk/ pestisida kimia	25
Memiliki pemahaman tentang cara pengelolaan hutan kemasyarakatan secara tradisional dan modern dengan menjaga hutan tetap lestari	Mengelola hutan secara modern dan tradisional dengan mengedepankan aspek hutan yang lestari	25
Memiliki cara tertentu untuk melestarikan lingkungan	Menjaga lingkungan dengan menggunakan aturan adat	25
Adanya peningkatan tutupan hutan dalam areal Hkm	Tidak ada perubahan	15
Total		150

Sumber: Data Lapangan, 2023

Berdasarkan hasil penilaian aspek lingkungan Tabel 5, diperoleh bahwa dalam hal kriteria keberadaan konflik yang pernah terjadi dalam pengelolaan HKm menunjukkan bahwa dalam pengelolaan HKm oleh Kelompok Tani Lereng Ambeso belum pernah terjadi konflik

dengan nilai maksimal yakni 25. Kondisi ini sejalan dengan temuan Beyerl et al. (2016) yang menyatakan bahwa persepsi positif dan kesepahaman antar anggota komunitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Tidak adanya konflik dalam pengelolaan HKm Lereng Ambeso mengindikasikan adanya mekanisme tata kelola yang efektif dan komunikasi yang baik antar anggota kelompok. Untuk kriteria kesadaran dan usaha dalam perlindungan keanekaragaman yang ada di dalam hutan kemasyarakatan, menunjukan bahwa pengelola kelompok tani Lereng Ambeso hanya mempunyai usaha perlindungan yang belum sampai pada tahap kesadaran atau dengan nilai 20.

Dalam hal peningkatan ketersediaan dan kualitas air di sekitar wilayah HKm menunjukan bahwa dengan adanya pengelolaan HKm ketersediaan dan kualitas air berada dalam kategori sedang atau normal dengan nilai 10. Sedangkan terkait upaya menjaga kualitas tanah dalam mengolah areal HKm menunjukan bahwa kelompok tani Lereng Ambeso dalam melakukan pengelolaan HKm tidak mengolah dengan pupuk/pestisida kimia dengan nilai 25.

Terkait kriteria pemahaman tentang cara pengelolaan hutan kemasyarakatan secara tradisional dan modern dengan menjaga hutan tetap lestari menunjukan bahwa pengelolaan HKm dilakukan dengan mengelola hutan secara modern dan tradisional serta mengedepankan aspek hutan yang lestari dengan nilai 25. Pendekatan hybrid antara pengetahuan tradisional dan teknik modern ini sejalan dengan kajian Sheil yang menekankan pentingnya mengakui dan mengintegrasikan prioritas masyarakat lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati hutan tropis. Dalam konteks Toraja, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat terbukti mampu bersinergi dengan metode pengelolaan hutan modern untuk mencapai keberlanjutan.

Dalam hal cara tertentu untuk melestarikan lingkungan dalam areal pengelolaan HKm, anggota kelompok tani pengelola mempunyai kearifan tertentu untuk menjaga lingkungan yaitu dengan menggunakan aturan adat dengan nilai 25. Penggunaan aturan adat sebagai instrumen pelestarian lingkungan menunjukkan kuatnya modal sosial dalam komunitas KTH Lereng Ambeso. Hal ini sesuai dengan argumentasi Fitrianto (2022) bahwa lembaga masyarakat desa hutan yang kuat merupakan prasyarat bagi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Untuk variabel peningkatan tutupan hutan dalam areal Hkm, menunjukan bahwa dengan adanya pengelolaan HKm oleh kelompok tani Lereng Ambeso tutupan hutan dalam areal HKm berada dalam kategori tidak ada perubahan atau dalam arti meski tidak mengalami peningkatan setidaknya tidak terjadi deforestasi dengan nilai 15. Hal ini dikarenakan komoditi yang dikembangkan oleh kelompok tani adalah tanaman Kopi yang merupakan tanaman jangka panjang dan butuh akan naungan sehingga tutupan hutan menjadi sangat vital untuk dipertahankan kondisinya. Berdasarkan hasil kompilasi nilai terhadap 7 (tujuh) kriteria/variabel aspek lingkungan yang diukur menunjukan bahwa aspek lingkungan dalam pengelolaan HKm oleh kelompok tani Lereng Ambeso mempunyai nilai total 150 atau berada dalam kategori “Sangat Baik”.

Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan aspek yang mendeskripsikan kemajuan suatu kelompok tani dalam hal pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Adapun variabel penilaian yang diukur terkait sosio ekonomi dalam pelaksanaan HKm oleh Kelompok Tani Lereng Ambeso mencakup kriteria (1) peningkatan dalam volume produksi komoditi yang

diusahakan dalam areal izin HKm; (2) peningkatan pendapatan anggota KTH terhadap hasil produksi komoditi yang diusahakan dalam areal Izin HKm; (3) keuntungan dari pendapatan yang diperoleh anggota KTH per tahun yang berasal dari dalam areal HKm; (4) iuran anggota kelompok/koperasi tiap bulan dalam setahun; (5) Izin HKm yang diberikan telah menambah kesejahteraan masyarakat/ anggota KTH; (6) iuran anggota kelompok dalam setahun untuk Pengelolaan Kelompok Tani Hutan; (7) jaringan pasar hasil produksi; dan (8) keterlibatan perempuan / kesetaraan gender dalam pengelolaan Izin HKm yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan. Adapun hasil penilaian terhadap aspek ekonomi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Penilaian Aspek Ekonomi

Indikator	Hasil	Nilai
Adanya peningkatan dalam volume produksi komoditi yang diusahakan dalam areal Izin HKm	Normal s.d. Meningkat	23,18
Adanya peningkatan pendapatan anggota KTH terhadap hasil produksi komoditi yang diusahakan dalam areal Izin HKm	Normal s.d. Meningkat	22,50
Adanya keuntungan dari pendapatan yang diperoleh anggota KTH per Tahun yang berasal dari dalam areal HKm	Tidak ada s.d. Ada keuntungan	23,29
Adanya iuran anggota kelompok/koperasi tiap bulan dalam setahun	2 kali setahun	20
Adanya Izin HKm yang diberikan telah menambah kesejahteraan masyarakat/ anggota KTH	Ada	25
Adanya iuran anggota kelompok dalam setahun untuk Pengelolaan Kelompok Tani Hutan	1 kali setahun	15
Adanya jaringan pasar hasil produksi	Keluar Kabupaten	13,60
Adanya keterlibatan perempuan / kesetaraan gender dalam pengelolaan Izin HKm yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan	Ada	25
Total		167,57

Sumber: Data Lapangan, 2023

Berdasarkan hasil penilaian aspek lingkungan Tabel 6, diperoleh bahwa dalam hal kriteria peningkatan dalam volume produksi komoditi yang diusahakan dalam areal izin HKm menunjukkan bahwa sebanyak 36 responden mengalami peningkatan volume produksi sedangkan sebanyak 8 responden menyatakan volume yang dihasilkan dengan adanya HKm ini volume produksinya normal/ tetap sehingga nilai untuk kriteria peningkatan produksi ini sebesar 23,18. Untuk kriteria peningkatan pendapatan anggota KTH terhadap hasil produksi komoditi yang diusahakan dalam areal Izin HKm menunjukkan bahwa sebanyak 33 responden mengalami peningkatan pendapatan sedangkan sebanyak 11 responden menyatakan pendapatannya normal/ tetap sehingga nilai untuk kriteria peningkatan pendapatan ini diperoleh sebesar 22,50.

Dalam hal kriteria keuntungan dari pendapatan yang diperoleh anggota KTH per tahun yang berasal dari dalam areal HKm menunjukkan bahwa sebanyak 39 responden menyatakan adanya keuntungan melalui pengelolaan HK mini sedangkan sebanyak 5 responden menyatakan belum ada keuntungan atau masih dalam kondisi kembali modal sehingga nilai untuk kriteria adanya keuntungan ini diperoleh sebesar 23,29. Terkait kriteria adanya iuran anggota kelompok/koperasi tiap bulan dalam setahun menunjukkan bahwa kelompok tani

Lereng Ambeso mempunyai iuran yang bayarkan 2 kali dalam setahun sehingga nilai yang diperoleh untuk kriteria ini sebesar 20.

Untuk kriteria dengan adanya izin HKm yang diberikan telah menambah kesejahteraan masyarakat/ anggota KTH menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok tani mengalami peningkatan kesejahteraan dengan adanya izin HKm yang diberikan ini sehingga nilai yang diperoleh sebesar 25. Sedangkan dalam hal kriteria adanya iuran anggota kelompok dalam setahun untuk Pengelolaan Kelompok Tani Hutan menunjukkan bahwa tiap anggota kelompok tani Lereng Ambeso membayarkan iuran 1 kali dalam setahun untuk pengelolaan kelompok tani dan kriteria ini menunjukkan nilai sebesar 15.

Terkait kriteria adanya jaringan pasar hasil produksi oleh masing-masing responden menunjukkan bahwa sebanyak 38 responden menyatakan memasarkan hasil komoditinya keluar kabupaten dalam provinsi sedangkan 6 responden menyatakan memasarkan hasil komoditinya masih dalam lingkup kabupaten dan belum ada responden yang memasarkan hasilnya keluar dari provinsi sehingga untuk kriteria ini diperoleh nilai sebesar 13,60. Dan untuk kriteria adanya keterlibatan perempuan / kesetaraan gender dalam pengelolaan Izin HKm yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Izin HKm oleh kelompok tani Benteng Ambeso terdapat keterlibatan perempuan / kesetaraan gender sehingga skor yg diperoleh sebesar 25.

Berdasarkan hasil kompilasi nilai terhadap 8 (delapan) kriteria/variabel aspek sosio ekonomi yang diukur menunjukkan bahwa aspek sosio ekonomi dalam pengelolaan HKm oleh kelompok tani Lereng Ambeso mempunyai nilai total sebesar 167,57 atau berada dalam kategori “Sangat Baik”.

Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan aspek yang mendeskripsikan tata kelola dan tata kerja suatu kelompok tani dalam melakukan aktivitas keorganisasian dan peran serta setiap anggota dalam mendukung kinerja organisasi. Adapun variabel penilaian yang diukur terkait aspek kelembagaan dalam pelaksanaan HKm oleh Kelompok Tani Lereng Ambeso mencakup kriteria (1) adanya dokumen nama-nama pengurus dan anggota kelompok; (2) adanya penyelesaian konflik yang mampu ditangani oleh pengurus KTH; (3) adanya pertemuan pengurus atau anggota; (4) adanya capaian kegiatan pengurus kelembagaan sesuai RU/RKT; dan (5) adanya kelengkapan administrasi kelompok (memiliki buku tamu, buku inventaris, keuangan, daftar hadir, notulensi, buku surat menyurat). Adapun hasil penilaian terhadap aspek sosio ekonomi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Penilaian Aspek Kelembagaan

Indikator	Hasil	Nilai
Adanya dokumen nama-nama pengurus dan anggota kelompok/ koperasi	Ada	25
Adanya penyelesaian konflik yang mampu ditangani oleh pengurus KTH	Semua	25
Adanya pertemuan pengurus atau anggota	2 kali setahun	15
Adanya capaian kegiatan pengurus kelembagaan sesuai RU/RKT	Mencapai target lebih 50% s/d 75%	15

Indikator	Hasil	Nilai
Kelengkapan administrasi kelompok (Memiliki buku tamu, buku inventaris, keuangan, daftar hadir, notulensi, buku surat menyurat)	Memiliki buku tamu, buku inventaris, keuangan, daftar hadir, notulensi	25
Total		105

Sumber: Data Lapangan, 2023

Berdasarkan hasil penilaian aspek lingkungan Tabel 7, diperoleh bahwa dalam hal kriteria adanya dokumen nama-nama pengurus dan anggota kelompok menunjukkan bahwa kelompok tani Lereng Ambeso mempunyai dokumen terkait nama-nama pengurus dan anggota kelompok sehingga kriteria ini diperoleh nilai 25. Selanjutnya untuk kriteria adanya penyelesaian konflik yang mampu ditangani oleh pengurus KTH menunjukkan bahwa pengurus kelompok tani dapat menyelesaikan semua konflik terkait hubungan organisasi antar anggota sehingga untuk kriteria ini diperoleh nilai sebesar 25. Dalam hal kriteria adanya pertemuan pengurus atau anggota menunjukkan bahwa pengurus dan anggota kelompok tani Lereng Ambeso melakukan pertemuan sebanyak 2 kali dalam setahun sehingga untuk kriteria ini memperoleh nilai sebesar 15.

Untuk kriteria adanya capaian kegiatan pengurus kelembagaan sesuai RU/RKT menunjukkan bahwa pengurus kelompok tani Lereng Ambeso dapat mencapai target dengan kisaran 50% - 75% dari yang termuat dalam rencana kelompok sehingga untuk kriteria ini diperoleh nilai 15. Dan untuk kriteria adanya kelengkapan administrasi kelompok seperti memiliki buku tamu, buku inventaris, keuangan, daftar hadir, notulensi, buku surat menyurat, menunjukkan bahwa pengurus mempunyai dokumen administrasi tersebut secara lengkap sehingga untuk kriteria ini diperoleh nilai sebesar 25.

Berdasarkan hasil kompilasi nilai terhadap 5 (lima) kriteria/variabel aspek kelembagaan yang diukur menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dalam pengelolaan HKM oleh kelompok tani Lereng Ambeso mempunyai nilai total sebesar 105,00 atau berada dalam kategori “Cukup Baik”.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh Kelompok Tani Hutan Lereng Ambeso di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan kinerja yang sangat baik pada aspek lingkungan, ditandai dengan belum pernah terjadinya konflik, ketersediaan dan kualitas air yang berada pada kategori sedang atau normal, pengelolaan tanpa penggunaan pupuk atau pestisida kimia, penerapan pengelolaan hutan secara modern dan tradisional dengan prinsip lestari, penerapan kearifan lokal melalui aturan adat, sertautupan hutan yang tetap stabil tanpa deforestasi. Aspek ekonomi juga berada pada kategori sangat baik, tercermin dari peningkatan volume produksi komoditas dalam areal HKM, peningkatan pendapatan mayoritas anggota, keuntungan yang diperoleh anggota melalui pengelolaan HKM, iuran kelompok yang dibayarkan dua kali setahun, peningkatan kesejahteraan anggota, pemasaran komoditas ke luar kabupaten, serta keterlibatan perempuan yang meningkat. Sementara itu, aspek kelembagaan berada pada kategori cukup baik, ditunjukkan dengan adanya dokumen nama-nama pengurus dan anggota kelompok, kemampuan pengurus menyelesaikan konflik internal, pelaksanaan

pertemuan dua kali setahun, pencapaian target kelompok sebesar 50%-75% dari rencana, serta ketersediaan dokumen administrasi kelompok secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, O. (2019). Analisis kelembagaan implementasi perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi*, 16(2), 139–162.
- Anwarudin, D. A. F. (2024). *Persepsi Masyarakat Sekitar Hutan Produksi Tetap Terhadap Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus LMDH Jati Jaya Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)*. Universitas Islam Balitar.
- Banjade, M. R., Herawati, T., Liswanti, N., & Mwangi, E. (2016). *Tenure reform in Indonesia: When? What? Why?* CIFOR Infobrief No. 163. Center for International Forestry Research.
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238.
- Beyerl, K., Putz, O., & Breckwoldt, A. (2016). The role of perceptions for community-based marine resources management. *Frontiers in Marine Science*, 3, Article 238. <https://doi.org/10.3389/fmars.2016.00238>
- Bimantara, T., & Samsu, A. K. A. (2025). Analisis Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Kabupaten Toraja Utara: Analysis Of Institutional Governance In Social Forestry Management In North Toraja Regency. *Jurnal Eboni*, 7(1), 10–19.
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100–117.
- Dimas, F., Adelina, C., Fadhillah, K. K., & Satrio, A. W. (2019). Pengembangan kerangka evaluasi program perhutanan sosial di kawasan hutan lindung: Studi kasus Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HD). *WRI Indonesia*.
- Fitri, R. A., & Prasmatiwi, F. E. (2022). Peran Gender, Pendapatan Dan Kesejahteraan Subjektif Rumah Tangga Petani Kopi Di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 10(2), 291–298.
- Fitriana, Y. R. (2021). *Transmigrasi dan Hak Kewarganegaraan Agraria*. Nusamedia.
- Fitrianto, J., Amin, D. E. S., & Herdiana, D. (2022). Peningkatan Ekonomi Petani Kopi Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama MAsyarakat (PHBM). *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1).
- García, S. O., Santillan, V. S., Vivier, V. B., Anglés-Hernández, M., Pérez, M. E., & Prado, B. (2022). Soil governance and sustainable agriculture in Mexico. *Soil Security*, 7, 100059.
- Herindrasti, V. L. S., Winarno, E., & Prawiro, G. (2022). Inisiatif Lokal dalam Pengembangan Pariwisata dan Perlindungan Kelestarian Hutan Kalibiru Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo DIY. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 49–62.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13.

- Laksemi, N. P. S. T., & Sulistyawati, E. (2019). Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri)(Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri)). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150–163.
- Marzuki, A. (2025). Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Yang Berkeadilan. *Penerbit Tahta Media*.
- Muliawan TS, A. P. (2021). *Pengaruh kontribusi pendapatan penyadap getah pinus terhadap kesejahteraan ekonomi di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone*. Universitas Negeri Makassar.
- Paembonan, J., Surya, B., & Syafri, S. (2021). Studi Perilaku Masyarakat Bermukim di Sempadan Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. *Urban and Regional Studies Journal*, 3(2), 70–82.
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 74–94.
- Purnomo, H., Ilham, Q. P., & Achdiawan, R. (2018). *Riset Aksi untuk Perbaikan Tata Kelola dan Nilai Tambah Hutan dan Lingkungan*. Bogor: IPB Press.
- Siahaya, J. S., Latuamury, B., & Loppies, R. (2024). Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan Lanskap Hutan Das Wae Batu Merah Kota Ambon. *Jurnal Nusa Sylva*, 24(2), 58–69.
- Surasana, I. N., Fauzi, F., & Priyono, B. (2022). Persepsi Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. *Agrienvi: Jurnal Ilmu Pertanian*, 16(2), 161–166.
- Syarief, F., Kurniawan, A., Widodo, Z. D., Nugroho, H., Rimayanti, R., Siregar, E., Isabella, A. A., Fitriani, F., Kairupan, D. J. I., & Siregar, Z. H. (2022). *Manajemen sumber daya manusia*. Penerbit Widina.
- Tifani, N. C., & Syafitri, F. (2024). Kemitraan Otentik Pendamping dalam Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(2), 145–165.
- Trilia, T. P. (2023). *Pemanfaatan Bambu (Bambusa Sp) Di Sekitar Kawasan Wisata Bambu To'kumila'lembang Tonga'riu Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara*. Universitas Sulawesi Barat.
- Wasongko, F. W., Tafalas, M. G., & Watunglawar, B. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa Bagi Masyarakat Kampung Ubadari, Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2689–2709.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).